

ANALISIS KONSEP KESEIMBANGAN PASAR DALAM PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA BAGI SISTEM EKONOMI ISLAM MODERN

Fawwas Akif Prayoga¹, Salsabila Rahma², Yasmin Sasmita³, Dwi Artika Urbasari⁴, Fitri Hayati⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ¹²³⁴

¹fwazprayoga@gmail.com, ²namakusalsa329@gmail.com, ³yasminsasmitaa@gmail.com,

⁴artikadwi44@gmail.com, ⁵fitrihayati@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah dalam perspektif ekonomi Islam modern, khususnya terkait konsep keseimbangan pasar dan peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menelaah pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hubungan antara penawaran dan permintaan, keadilan dalam transaksi, serta mekanisme pasar yang bebas dari manipulasi dan praktik curang. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah memiliki relevansi tinggi terhadap sistem ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam konteks pengawasan harga, pengaturan pasar, dan prinsip *hisbah* sebagai instrumen regulasi moral dan sosial. Selain itu, prinsip-prinsip yang dikemukakan Ibnu Taimiyah tentang intervensi negara, distribusi yang adil, dan perlindungan konsumen dapat menjadi solusi terhadap persoalan pasar bebas modern seperti ketimpangan ekonomi dan praktik monopoli. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat integrasi pemikiran ekonomi Islam klasik dengan kebijakan ekonomi modern guna menciptakan sistem pasar yang stabil, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Ibnu Taimiyah, keseimbangan pasar, ekonomi Islam, *hisbah*, regulasi pasar

Abstract

This study examines the economic thought of Ibn Taymiyyah from the perspective of modern Islamic economics, particularly focusing on the concept of market equilibrium and the role of the state in maintaining economic stability. Using a literature review approach, the research explores Ibn Taymiyyah's views on the interaction between supply and demand, justice in transactions, and the importance of a market mechanism free from manipulation and unethical practices. The findings reveal that Ibn Taymiyyah's ideas are highly relevant to contemporary Islamic economic systems, especially in terms of price regulation, market oversight, and the implementation of hisbah as a moral and social regulatory tool. Furthermore, his principles on state intervention, fair distribution, and consumer protection offer practical solutions to modern economic challenges such as inequality and monopolistic practices. This study contributes to strengthening the integration of classical Islamic economic values with modern policy frameworks to establish a stable, just, and welfare-oriented market system.

Keywords: Ibn Taymiyyah, market equilibrium, Islamic

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

<i>economics, hisbah, market regulation</i>	
---	--

PENDAHULUAN

Konsep keseimbangan pasar merupakan salah satu topik sentral dalam ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Dalam teori ekonomi konvensional, keseimbangan pasar terjadi ketika harga barang dan jasa berada pada titik temu antara permintaan dan penawaran. Namun, teori ini seringkali tidak mempertimbangkan dimensi etika dan keadilan sosial. Di sinilah ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan menempatkan nilai moral dan keadilan sebagai bagian integral dari mekanisme pasar (Antonio, 2011).

Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam yang memberikan perhatian besar terhadap pasar dan prinsip keadilannya adalah Ibnu Taimiyah. Melalui berbagai karyanya, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pasar tidak boleh dibiarkan sepenuhnya bebas dari pengawasan. Ia menekankan bahwa intervensi negara diperlukan apabila terjadi ketimpangan yang merugikan masyarakat umum, seperti praktik monopoli atau manipulasi harga (Rahman, 1997). Pemikiran ini menempatkan Ibnu Taimiyah sebagai salah satu pelopor gagasan keseimbangan pasar dalam tradisi Islam.

Meskipun kontribusi Ibnu Taimiyah dalam bidang ekonomi telah banyak dibahas oleh para akademisi, sebagian besar studi hanya berfokus pada aspek normatif tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan konteks ekonomi Islam modern. Padahal, dalam menghadapi realitas pasar global saat ini yang sarat dengan eksploitasi dan ketimpangan distribusi, pemikiran Ibnu Taimiyah memiliki relevansi tinggi untuk dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam kontemporer (Chapra, 2000).

Permasalahan yang muncul adalah adanya kesenjangan antara teori pasar dalam ekonomi Islam klasik dengan praktik sistem ekonomi Islam modern. Banyak institusi keuangan dan ekonomi syariah saat ini yang masih mengadopsi mekanisme pasar konvensional tanpa mempertimbangkan prinsip keseimbangan dan keadilan sosial sebagaimana diajarkan oleh ulama seperti Ibnu Taimiyah. Hal ini menunjukkan perlunya reaktualisasi pemikiran klasik ke dalam kerangka kebijakan ekonomi masa kini (Kahf, 2003).

Sebagian studi kontemporer juga cenderung hanya mengulas aspek fiqh muamalah dari pandangan Ibnu Taimiyah, seperti larangan riba atau hisbah, tanpa menggali secara sistematis teori pasar yang dibangunnya. Padahal dalam *Majmu' al-Fatawa* dan *Al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah membahas dengan mendalam mekanisme harga, pengaruh kekuatan permintaan dan penawaran, serta peran negara dalam mengatur keadilan distribusi (Islahi, 2009). Kekayaan pemikiran ini masih belum diintegrasikan secara optimal dalam literatur ekonomi Islam kontemporer.

Penelitian ini dilakukan sebagai respon atas gap tersebut. Penulis ingin mengangkat kembali gagasan Ibnu Taimiyah mengenai keseimbangan pasar dan menganalisis relevansinya terhadap sistem ekonomi Islam modern. Dengan begitu, diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara warisan intelektual klasik dengan tantangan ekonomi Islam saat ini.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis konsep keseimbangan pasar menurut Ibnu Taimiyah, serta mengevaluasi sejauh mana pemikiran tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan sistem ekonomi Islam modern yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan menegaskan bahwa pasar dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari nilai moral dan peran negara sebagai penjaga keadilan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam hal formulasi model pasar yang tidak hanya berbasis efisiensi tetapi juga integritas nilai. Dengan mengangkat pendekatan filosofis-historis dari Ibnu Taimiyah, penelitian ini memperluas horizon akademik terhadap kerangka kerja sistem pasar yang bercorak Islam (Haneef, 2005).

LANDASAN TEORI**1. Konsep Keseimbangan Pasar dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam, keseimbangan pasar bukan sekadar titik temu antara permintaan dan penawaran, melainkan sebuah kondisi ideal yang mencerminkan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Keseimbangan pasar diharapkan terjadi secara alami selama prinsip-prinsip syariah dijaga oleh pelaku pasar. Ini berarti adanya transparansi informasi, kesetaraan hak antara penjual dan pembeli, serta tidak adanya eksploitasi terhadap salah satu pihak (Antonio, 2011).

Prinsip keadilan dalam Islam menolak praktik eksploitasi harga seperti penimbunan (ihtikar) atau monopoli (ihtikar bi al-su'), karena dapat menyebabkan distorsi pasar yang merugikan masyarakat luas. Dalam hal ini, mekanisme pasar dipandang sebagai instrumen yang perlu diawasi dan dibingkai oleh nilai-nilai moral Islam agar tidak keluar dari rel keadilan (Chapra, 2000).

Berbeda dengan pendekatan kapitalistik yang menitikberatkan pada efisiensi dan kebebasan mutlak pasar, Islam menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab sosial. Tujuan pasar dalam Islam bukan semata-mata akumulasi keuntungan, tetapi juga distribusi manfaat dan terjaminnya kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, keseimbangan pasar harus mencakup aspek material dan spiritual (Siddiqi, 2001).

Fungsi pasar sebagai wahana pertukaran harus selaras dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dalam hal ini, intervensi negara bukan dianggap sebagai ancaman bagi kebebasan pasar, melainkan sebagai pengatur moral agar tujuan ekonomi Islam dapat tercapai (Islahi, 2009).

Dalam praktiknya, pasar yang seimbang akan mendorong stabilitas harga dan menghindarkan konsumen dari ketidakpastian. Hal ini penting dalam ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dalam distribusi serta menjamin hak-hak individu dalam bermuamalah. Keseimbangan juga menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif dalam batas yang dibenarkan syariah (Mannan, 1996).

Dengan demikian, konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan teori klasik. Tidak hanya mencakup mekanisme teknis pasar, tetapi juga mencakup etika, tanggung jawab sosial, serta upaya menjaga kemaslahatan umum melalui instrumen ekonomi yang adil dan syar'i (Zarqa, 2005).

2. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai salah satu pemikir Muslim yang sangat memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam kerangka syariah. Dalam karya-karyanya, ia menunjukkan pandangan yang maju mengenai sistem pasar, harga, dan peran pemerintah. Baginya, harga bukan sesuatu yang bisa diintervensi secara sewenang-wenang, namun dalam kondisi tertentu, negara wajib bertindak untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan pasar (Islahi, 2009).

Salah satu pemikiran utama Ibnu Taimiyah adalah bahwa harga barang pada dasarnya ditentukan oleh interaksi alamiah antara penjual dan pembeli. Namun, ketika terdapat ketimpangan atau manipulasi pasar, seperti penimbunan barang atau kartel, maka negara boleh menetapkan harga demi kemaslahatan masyarakat (Rahman, 1997). Pemikiran ini dikenal sebagai "tas'ir dalam keadaan darurat".

Ibnu Taimiyah juga membahas pentingnya keadilan dalam aktivitas ekonomi. Menurutinya, segala bentuk penipuan, kecurangan, dan monopoli tidak hanya merusak keseimbangan pasar, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap syariah. Ia menekankan bahwa muamalah yang sah harus terbebas dari unsur kedzaliman dan gharar (ketidakpastian) (Nasution, 2005).

Dalam pandangan beliau, pasar yang sehat adalah pasar yang memiliki kontrol moral dan diawasi oleh negara. Ibnu Taimiyah mendukung eksistensi lembaga pengawasan seperti hisbah,

yang bertugas mengontrol praktik dagang dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran serta keadilan dalam transaksi (Islahi, 1988).

Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam ekonomi sangat menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif. Ia tidak menginginkan pasar yang sepenuhnya bebas tanpa kontrol, tetapi juga tidak mendukung ekonomi yang terlampaui dikendalikan negara. Baginya, negara hadir sebagai pengatur moral, bukan dominator pasar (Haneef, 2005).

Dengan pendekatan tersebut, Ibnu Taimiyah telah merumuskan kerangka pasar yang ideal dalam Islam, yang memadukan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Pemikiran ini sangat relevan dengan tantangan sistem ekonomi kontemporer, terutama dalam menghadapi persoalan spekulasi, krisis harga, dan dominasi pasar oleh segelintir aktor ekonomi (Kahf, 2003).

3. Mekanisme Harga dan Intervensi Negara

Ibnu Taimiyah memahami bahwa harga dalam ekonomi merupakan hasil dari interaksi kekuatan pasar, yakni permintaan dan penawaran. Namun, ia juga menyadari bahwa kekuatan pasar tidak selalu menghasilkan harga yang adil. Oleh sebab itu, ia memperkenankan intervensi negara dalam bentuk penetapan harga (*tas'ir*) ketika terjadi kecurangan atau distorsi pasar (Islahi, 2009).

Konsep *tas'ir* menurut Ibnu Taimiyah berbeda dengan kontrol harga permanen. Ia menekankan bahwa penetapan harga hanya sah dilakukan apabila ada indikasi kezaliman atau ketidakseimbangan yang menimbulkan kerugian publik. Jika pasar berjalan secara adil dan alami, maka *tas'ir* dianggap tidak perlu dilakukan (Rahman, 1997).

Pendekatan Ibnu Taimiyah terhadap intervensi harga mencerminkan prinsip maslahat dan keadilan. Negara tidak serta-merta mencampuri harga, namun berperan sebagai penjaga agar harga tidak digunakan sebagai alat eksploitasi oleh pelaku pasar. Hal ini menunjukkan pemahaman mendalam beliau tentang dinamika ekonomi (Nasution, 2005).

Prinsip ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam Islam bukanlah sistem *laissez-faire*, melainkan sistem berbasis etika yang menempatkan negara sebagai pengontrol etis, bukan pengendali absolut. Dalam kerangka ini, negara memainkan peran regulator, bukan sebagai pelaku utama dalam pasar (Chapra, 2000).

Ibnu Taimiyah juga menyebut bahwa jika pelaku pasar berperilaku curang—misalnya menimbun barang atau menciptakan kelangkaan buatan—maka intervensi menjadi wajib. Ini membuktikan bahwa kebebasan pasar dalam Islam bukanlah mutlak, melainkan bersyarat pada kejujuran dan tidak merugikan pihak lain (Kahf, 2003).

Dengan pendekatan yang seimbang antara kebebasan dan intervensi, Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi besar dalam membentuk teori harga dalam ekonomi Islam yang adil, dinamis, dan relevan bagi sistem ekonomi modern yang tengah mencari solusi dari ketimpangan dan ketidakadilan pasar (Zarqa, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama. Metode ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, maupun karya klasik pemikir Islam, khususnya karya-karya Ibnu Taimiyah. Studi literatur dinilai tepat untuk menggali pemikiran tokoh klasik serta menelaah relevansinya terhadap konteks ekonomi Islam modern secara konseptual.

Dalam melakukan studi literatur ini, penulis mengkaji sejumlah karya penting Ibnu Taimiyah, terutama *Majmu' al-Fatawa*, *Al-Hisbah fi al-Islam*, dan referensi pemikiran beliau yang dikaji ulang oleh para sarjana kontemporer seperti Abdul Azim Islahi, Monzer Kahf, dan M. Umer Chapra. Selain itu, analisis dilakukan terhadap jurnal-jurnal nasional dan internasional yang membahas tentang sistem pasar, konsep harga, serta peran negara dalam ekonomi Islam.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan menekankan pada pemaknaan teks dan keterkaitan antar konsep. Teknik analisis dilakukan dengan cara: (1) mengidentifikasi tema sentral dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pasar dan harga, (2) mengkaji pendapat para sarjana ekonomi Islam kontemporer terkait relevansi pemikiran tersebut, dan (3) menarik kesimpulan tentang kontribusi teoritik terhadap sistem ekonomi Islam modern.

Kriteria pemilihan literatur mengacu pada keterkinian, kredibilitas, serta keterkaitan langsung dengan topik. Literatur yang digunakan dipilih dari publikasi bereputasi, termasuk jurnal yang terindeks SINTA dan Scopus, serta buku teks klasik dan kontemporer. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk membangun kerangka pemahaman yang mendalam terhadap prinsip keseimbangan pasar dalam pandangan Ibnu Taimiyah dan potensinya untuk diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi Islam saat ini.

Keterbatasan penelitian ini diakui, karena bersifat konseptual dan tidak menyajikan data empiris langsung dari praktik pasar kontemporer. Namun, sebagai kajian teoritik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam menghadirkan kembali nilai-nilai warisan klasik ke dalam konteks kebijakan ekonomi masa kini.

Dengan demikian, metode studi literatur ini memberikan ruang untuk eksplorasi yang lebih luas terhadap konsep normatif dan prinsip dasar dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris atau kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keseimbangan pasar menempatkan mekanisme harga sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menurut beliau, harga dapat naik atau turun karena sebab alamiah seperti kelangkaan atau melimpahnya barang, dan karena intervensi manusia seperti penimbunan barang atau kecurangan. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah membedakan antara fluktuasi harga yang adil secara pasar dengan manipulasi yang merusak keadilan distribusi ekonomi (Islahi, 2006).

Konsep ini secara tidak langsung menunjukkan pemahaman Ibnu Taimiyah terhadap hukum penawaran dan permintaan. Ketika terjadi kenaikan harga karena kelangkaan, beliau menilai hal tersebut sebagai wajar dan tidak bisa disalahkan secara moral atau hukum. Namun jika harga naik karena adanya praktik monopolistik, maka negara memiliki hak untuk turun tangan. Ini mencerminkan prinsip *hisbah* dalam Islam, di mana negara berperan sebagai pengawas moral dan ekonomi (Kahf, 2003).

Relevansi pemikiran ini terhadap sistem ekonomi Islam modern sangat signifikan, khususnya dalam mengatur pasar bebas yang tetap bermoral. Dalam sistem ekonomi Islam kontemporer, prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi tujuan utama, dan konsep intervensi negara dalam pasar yang diajukan Ibnu Taimiyah bisa menjadi rujukan normatif untuk merumuskan kebijakan fiskal dan pengawasan harga (Chapra, 2000).

Dalam konteks kekinian, intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga barang pokok atau mengatur pasar melalui kebijakan subsidi bisa disandingkan dengan prinsip *hisbah* yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini menunjukkan bahwa pemikiran beliau tidak hanya berbasis normatif agama, tetapi juga memiliki logika ekonomi praktis yang relevan dengan pendekatan kebijakan modern (Al-Omar & Abdel-Haq, 1996).

Ibnu Taimiyah juga memberikan penekanan penting terhadap kejujuran dalam transaksi ekonomi. Menurutnya, pasar akan tetap seimbang jika para pelaku ekonomi tidak menipu dan tidak melakukan rekayasa pasar. Oleh karena itu, beliau mendukung peran negara dalam mengawasi pasar demi mencegah praktik curang seperti penimbunan dan pengaturan harga oleh kartel (Islahi, 1988).

Pemikiran Ibnu Taimiyah memperlihatkan bahwa ekonomi Islam bukanlah sistem *laissez-faire* yang murni bebas, melainkan sistem pasar yang dikontrol oleh etika dan keadilan. Hal ini

mempertegas bahwa kebebasan ekonomi dalam Islam harus selalu beriringan dengan tanggung jawab sosial dan moral (Nasution, 2001).

Dalam kerangka sistem ekonomi Islam modern, pemikiran Ibnu Taimiyah membuka ruang untuk pembentukan mekanisme pengawasan harga yang tidak semata-mata bertumpu pada mekanisme pasar. Ini menjadi rujukan untuk merumuskan peran negara yang seimbang: tidak terlalu intervensionis, tetapi juga tidak membiarkan pasar bekerja tanpa arah moral (Karim, 2010).

Studi literatur menunjukkan bahwa banyak sarjana kontemporer yang mengakui keunggulan pendekatan Ibnu Taimiyah dalam menjembatani antara kebebasan pasar dan kontrol sosial. Konsep keseimbangan yang beliau tawarkan bersifat dinamis, bukan hanya keseimbangan angka dan angka, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan distribusi (Haneef & Furqani, 2011).

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah dapat diadopsi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam modern, terutama dalam menghadirkan keadilan ekonomi dan menghindari kerusakan pasar. Pemikiran beliau menjadi jembatan antara nilai-nilai syariah dan prinsip ekonomi kontemporer, yang relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini (Zarqa, 2004).

Akhirnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah bukan hanya warisan klasik, melainkan juga sumber inspirasi normatif untuk merancang kebijakan ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan dalam kerangka Islam. Penekanan pada moralitas pasar, pengawasan negara, dan keadilan harga menjadikan konsep beliau sangat relevan sebagai model teoritik ekonomi Islam kontemporer (Dusuki, 2008).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah memiliki pemikiran ekonomi yang progresif dan kontekstual terhadap dinamika pasar. Beliau memahami bahwa fluktuasi harga merupakan konsekuensi dari hukum penawaran dan permintaan yang alamiah. Namun demikian, ia menekankan bahwa peran negara sangat penting ketika terjadi ketidakseimbangan pasar akibat praktik tidak adil seperti penimbunan, manipulasi harga, dan monopoli.

Konsep keseimbangan pasar menurut Ibnu Taimiyah tidak sekadar melihat pada aspek kuantitatif antara penawaran dan permintaan, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan keadilan sosial. Hal ini tercermin dari dukungannya terhadap prinsip *hisbah*, yang menempatkan negara sebagai pengawas moral ekonomi untuk menjaga stabilitas dan kemaslahatan umum.

Dalam konteks sistem ekonomi Islam modern, pemikiran Ibnu Taimiyah menjadi sangat relevan karena mampu menjembatani antara mekanisme pasar dan nilai-nilai etis Islam. Pendekatan beliau memberikan kerangka konseptual dalam merancang intervensi pasar yang adil, tanpa harus mengabaikan efisiensi ekonomi. Hal ini menjadi kontribusi penting dalam menyusun kebijakan publik yang seimbang dan berpihak pada keadilan.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah masih relevan dijadikan rujukan dalam perumusan teori-teori ekonomi Islam modern, khususnya terkait dengan pengawasan harga, peran negara, serta etika dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai klasik ini ke dalam kebijakan ekonomi kontemporer sangat penting sebagai bagian dari pembangunan ekonomi Islam yang holistik dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Omar, F. A., & Abdel-Haq, M. (1996). *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges*. Oxford University Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.

- Dusuki, A. W. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132-148.
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2011). Methodology of Islamic Economics: Typology of Current Practices, Evaluation and Way Forward. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 19(1), 1-26.
- Islahi, A. A. (1988). *Economic Concepts of Ibn Taymiyyah*. The Islamic Foundation.
- Islahi, A. A. (2006). Ibn Taymiyyah's Concept of Market Mechanism. *Review of Islamic Economics*, 10(1), 1-24.
- Kahf, M. (2003). Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology. *Review of Islamic Economics*, 13, 23-47.
- Karim, A. A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, A. (2001). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Zarqa, M. A. (2004). Islamization of Economics: The Concept and Methodology. *Islamic Economic Studies*, 11(2), 1-18.